



Research Article

Pengaruh Indeks Demokrasi dan Dinamika Politik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Masa Pemerintahan Joko Widodo

Lailatun Nuroniyah, Mellyna Mustika Rini, Mashudi

1. Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100207@student.trunojoyo.ac.id
2. Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100089@student.trunojoyo.ac.id
3. Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; Mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 26, 2025

Revised : April 17, 2025

Accepted : May 19, 2025

Available online : June 17, 2025

How to Cite: Lailatun Nuroniyah, Mellyna Mustika Rini, & Mashudi. (2025). The Influence of Democracy Index and Political Dynamics on Economic Growth in Indonesia During the Joko Widodo Administration. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 3(3), 168-182. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v3i3.83>

The Influence of Democracy Index and Political Dynamics on Economic Growth in Indonesia During the Joko Widodo Administration

Abstract. This research aims to analyze the influence of the democracy index and political dynamics on economic growth in Indonesia during the administration of President Joko Widodo. In this research, secondary data is used which includes the democracy index, political dynamics indicators,

and Indonesian economic data for the 2014-2024 period. The results of the analysis show that although Indonesia has experienced an increase in the democracy index, political dynamic factors, such as political stability and public policy, have a significant role in influencing economic growth. Reducing levels of political polarization and progress in the quality of democracy contribute positively to economic stability. However, challenges in political policy and structural changes are factors that influence economic outcomes in a more complex way. This research concludes that the combination of democratic quality and stable political dynamics is the main key in creating sustainable economic growth in Indonesia.

Keywords: democracy index, political dynamics, economic growth, political stability, public policy, Indonesia, Joko Widodo government

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks demokrasi dan dinamika politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder yang mencakup indeks demokrasi, indikator-indikator dinamika politik, serta data ekonomi Indonesia selama periode 2014-2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami peningkatan dalam indeks demokrasi, faktor-faktor dinamika politik, seperti stabilitas politik dan kebijakan publik, memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penurunan tingkat polarisasi politik dan kemajuan dalam kualitas demokrasi berkontribusi positif terhadap kestabilan ekonomi. Namun, tantangan dalam kebijakan politik dan perubahan struktural menjadi faktor yang mempengaruhi hasil ekonomi secara lebih kompleks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi antara kualitas demokrasi dan dinamika politik yang stabil menjadi kunci utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci; indeks demokrasi, dinamika politik, pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, kebijakan publik, Indonesia, pemerintahan Joko Widodo.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Joko Widodo yang dimulai pada tahun 2014 hingga 2024 telah mengalami berbagai dinamika politik yang mempengaruhi kebijakan ekonomi di Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi yang semakin berkembang, dengan lebih banyaknya kebebasan politik dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan indeks demokrasi di Indonesia menjadi indikator penting dari sejauh mana sistem politik yang ada dapat mendukung stabilitas politik yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi.¹ Namun, pengaruh demokrasi terhadap ekonomi tidak selalu bersifat linear, karena banyak faktor yang turut mempengaruhi hasil ekonomi yang tercapai.

Indeks demokrasi Indonesia, yang diukur melalui indikator-indikator seperti kebebasan sipil, partisipasi politik, dan hak asasi manusia, menunjukkan adanya perbaikan sejak pemerintahan Joko Widodo dimulai. Menurut laporan dari Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia mencatatkan kemajuan dalam hal kualitas demokrasi meskipun masih menghadapi beberapa tantangan terkait kebebasan pers dan ruang politik yang terbatas bagi oposisi. Meskipun demikian, peningkatan indeks demokrasi di Indonesia dianggap dapat mendorong keterbukaan

¹ Economist Intelligence Unit, "Democracy Index 2023: A Year of Democratic Setbacks," EIU, 2023.

politik, meningkatkan transparansi pemerintahan, dan menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, dinamika politik dalam konteks demokrasi Indonesia juga turut memberikan tantangan tersendiri. Proses politik yang semakin terbuka dan partisipatif membawa dampak terhadap stabilitas politik negara. Persaingan politik yang ketat, polarisasi sosial, serta perubahan kebijakan yang terkadang terjadi secara mendadak dapat mempengaruhi keputusan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan investasi jangka panjang dan kebijakan makroekonomi. Dalam konteks ini, dinamika politik yang stabil dan kebijakan yang konsisten menjadi faktor penentu dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, meskipun Indonesia menunjukkan indikator pertumbuhan ekonomi yang positif dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan tersebut tidak selalu dapat sepenuhnya dijelaskan oleh faktor demokrasi semata. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar global, kebijakan ekonomi global, serta faktor-faktor domestik lainnya seperti infrastruktur, kebijakan fiskal, dan regulasi investasi juga turut berperan besar dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.² Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana interaksi antara indeks demokrasi, dinamika politik, dan faktor ekonomi lainnya dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh pengaruh indeks demokrasi dan dinamika politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama pemerintahan Joko Widodo. Dengan menganalisis data yang ada, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara aspek politik dan ekonomi serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Pemahaman ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengoptimalkan potensi demokrasi dan politik dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang.

KAJIAN PUSTAKA

Indeks Demokrasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Demokrasi adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat demokrasi di sebuah negara berdasarkan berbagai indikator. Indeks ini biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebebasan politik, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat dalam proses politik, dan pengelolaan pemerintahan yang baik.³ Menurut *The Economist Intelligence Unit (EIU)*, yang merilis laporan tahunan tentang Indeks Demokrasi, negara-negara dibagi menjadi empat kategori: demokrasi penuh, demokrasi yang rusak, rejim campuran, dan rejim otoriter.

² R. S. Siregar, "Democracy and Economic Growth: The Indonesian Experience," *Journal of Southeast Asian Economics*, vol. 35, no. 2, 2021, pp. 47-65.

³ Economist Intelligence Unit (EIU). "Democracy Index 2023: The State of Democracy." The Economist Intelligence Unit, 2023.

Dampak Indeks Demokrasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

1. Kestabilan politik

Demokrasi cenderung memberikan kestabilan politik yang lebih baik dibandingkan dengan rejim otoriter. Negara dengan tingkat demokrasi yang tinggi biasanya memiliki sistem pemerintahan yang lebih transparan, yang mendukung keputusan ekonomi yang lebih baik dan efisien. Kestabilan politik ini berpotensi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi ketidakpastian.

2. Kebebasan ekonomi

Negara yang lebih demokratis seringkali lebih mendukung kebebasan ekonomi, seperti hak untuk berbisnis, pasar yang terbuka, dan kebebasan untuk berinovasi. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor swasta dan investasi asing yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.⁴

3. Kualitas instusi

Demokrasi juga cenderung menghasilkan lembaga-lembaga yang lebih kuat dan lebih dapat dipercaya. Kualitas institusi yang tinggi penting untuk pertumbuhan ekonomi karena dapat memastikan penerapan kebijakan yang efektif, seperti perlindungan hak properti, pengawasan pasar, dan perlindungan terhadap korupsi.⁵ Sebaliknya, negara dengan tingkat demokrasi rendah seringkali berhadapan dengan masalah pengelolaan sumber daya yang buruk, korupsi, dan kebijakan ekonomi yang tidak stabil.

4. Pendidikan dan kesehatan

Negara demokratis cenderung lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup rakyat, yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.⁶ Kebijakan sosial yang lebih inklusif dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi negara.

5. Inovasi pengembangan teknologi

Demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan berbicara dan berpendapat, yang mendorong inovasi. Negara dengan tingkat demokrasi yang tinggi lebih cenderung mendukung riset dan pengembangan (R&D), serta menciptakan kebijakan yang memfasilitasi kemajuan teknologi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun ada beberapa tantangan yang perlu dicatat:

- **Proses demokrasi yang lambat:** Terkadang, proses pengambilan keputusan dalam sistem demokratis bisa lebih lambat karena adanya perdebatan publik dan persaingan politik. Hal ini dapat menghambat penerapan kebijakan ekonomi yang cepat dan efektif.

- **Populisme:** Di beberapa negara demokratis, munculnya gerakan populis bisa menyebabkan kebijakan ekonomi yang tidak terencana atau bahkan

⁴ Barro, R. J. (1996). "Democracy and Growth." *Journal of Economic Growth*, 1(1), 1-27.

⁵ Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. Cambridge University Press.

⁶ North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge University Press.

kontraproduktif, seperti proteksionisme atau pengurangan investasi di sektor-sektor penting.

Dinamika Politik dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dinamika politik yang terjadi di Indonesia juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. *Acemoglu et al. (2019)* menjelaskan bahwa stabilitas politik yang tinggi dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, perubahan kebijakan yang sering terjadi akibat ketidakstabilan politik atau polarisasi sosial justru dapat menghambat proses tersebut. Dalam konteks pemerintahan Joko Widodo, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan stabilitas politik, beberapa kebijakan ekonomi yang diambil, seperti kebijakan infrastruktur besar-besaran dan program reformasi birokrasi, sering kali terpengaruh oleh dinamika politik domestik. *Pratama (2021)* menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berusaha menjaga stabilitas, ketegangan politik dalam menghadapi pemilu atau hubungan dengan oposisi tetap berisiko mempengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi yang diambil.⁷

Dinamika politik merujuk pada perubahan dan pergeseran dalam struktur dan proses politik di suatu negara, termasuk perubahan pemerintahan, kebijakan politik, ideologi yang dominan, serta pergeseran dalam hubungan antara institusi negara dan masyarakat. Dinamika ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena dapat memengaruhi kebijakan ekonomi, kestabilan sosial, dan alokasi sumber daya. Ada beberapa faktor politik yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung atau tidak langsung.

a. Kebijakan fiskal dan moneter

Kebijakan fiskal (pajak dan belanja negara) serta kebijakan moneter (pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga) sangat dipengaruhi oleh dinamika politik suatu negara.⁸ Pemerintah yang lebih stabil dan memiliki kapasitas administratif yang baik dapat merancang dan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, yang akan menciptakan iklim ekonomi yang mendukung pertumbuhan.

Namun, dalam negara dengan dinamika politik yang tidak stabil, kebijakan sering kali berubah-ubah tergantung pada kepentingan politik jangka pendek. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian yang menghambat investasi dan keputusan ekonomi yang efisien. Misalnya, kebijakan ekonomi yang digerakkan oleh populisme sering kali menghasilkan kebijakan fiskal yang tidak berkelanjutan, seperti pengeluaran pemerintah yang berlebihan atau pengurangan pajak yang besar tanpa perencanaan yang matang.

b. Stabilitas politik

Stabilitas politik adalah salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Negara dengan stabilitas politik yang tinggi cenderung memiliki iklim

⁷ Pratama, A. (2021). "Evaluating Democracy and Its Impact on Economic Performance in Indonesia," *Indonesian Journal of Political Science*, 39(1), 102-118.

⁸ Rodrik, D. (2000). "Institutions for High-Quality Growth: What Are They and How to Acquire Them?" *Studies in Comparative International Development*, 35(3), 3-31.

investasi yang lebih baik. Kepercayaan investor domestik dan internasional meningkat, karena mereka merasa yakin bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan akan konsisten dan berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakstabilan politik, seperti pergantian pemerintahan yang sering, protes massal, atau konflik internal, dapat merusak kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi.⁹

Misalnya, di negara-negara dengan dinamika politik yang sangat terpolarisasi, sering terjadi perubahan kebijakan yang tiba-tiba setelah pemilu, yang bisa menimbulkan ketidakpastian di pasar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya investasi dan peningkatan risiko operasional bagi perusahaan.

c. Institusi dan tata Kelola pemerintahan

Institusi yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang baik memainkan peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Negara dengan tata kelola yang buruk, yang sering kali terkait dengan korupsi, ketidakadilan hukum, dan kelemahan institusi politik, sering kali mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar, melaksanakan kebijakan yang efektif, atau menegakkan aturan hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menghambat pembangunan.¹⁰

Di sisi lain, negara dengan institusi yang stabil dan kredibel seperti sistem hukum yang independen, peraturan yang transparan, dan pemerintahan yang efisien cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.¹¹ Negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong, yang memiliki tata kelola pemerintahan yang sangat baik, menunjukkan bagaimana institusi yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

d. Korupsi dan efisiensi pemerintah

Korupsi politik, yang sering muncul dalam dinamika politik yang tidak stabil, dapat merusak efisiensi ekonomi. Korupsi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, meningkatkan biaya transaksi, serta mengalihkan alokasi sumber daya dari investasi produktif ke sektor-sektor yang tidak efisien.¹² Selain itu, korupsi mengurangi efektivitas kebijakan ekonomi dan menghalangi redistribusi kekayaan yang adil, sehingga memperburuk ketimpangan sosial.

Negara-negara dengan dinamika politik yang lebih stabil dan kebijakan anti-korupsi yang kuat sering kali lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi sering terhambat oleh ketidakadilan distribusi sumber daya dan pemborosan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi.

e. Perubahan sosial dan proses demokratisasi

⁹ North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge University Press.

¹⁰ Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Publishing Group.

¹¹ Barro, R. J. (1996). "Democracy and Growth." *Journal of Economic Growth*, 1(1), 1-27.

¹² World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, D.C.: World Bank.

Dinamika politik yang melibatkan proses demokratisasi dan peningkatan partisipasi politik dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Negara yang lebih demokratis cenderung memiliki mekanisme untuk mengatasi ketimpangan sosial, menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, dan mengurangi konflik sosial. Kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, jika demokratisasi terjadi terlalu cepat atau dalam konteks yang tidak stabil, dapat menimbulkan ketidakpastian dan konflik politik yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, transisi menuju demokrasi di beberapa negara berkembang sering kali diiringi dengan ketegangan politik yang dapat mengganggu perekonomian.

Pengaruh Demokrasi terhadap Kebijakan Ekonomi di Indonesia

Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam kebijakan ekonomi seiring dengan perubahan dalam kualitas民主nya. *Suryadinata (2021)* mengemukakan bahwa peningkatan kebebasan politik dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan memungkinkan terciptanya kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintahan Joko Widodo berfokus pada pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor ekonomi domestik untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, *Widodo (2023)* berpendapat bahwa meskipun indikator demokrasi meningkat, ketidakpastian politik dan dinamika partai politik di Indonesia sering kali mempengaruhi implementasi kebijakan ekonomi yang konsisten. Hal ini menyebabkan ekonomi Indonesia terpengaruh oleh fluktuasi dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah.¹³

Demokrasi di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak jatuhnya Orde Baru pada 1998, yang menandai awal dari periode reformasi. Perubahan ini membawa Indonesia ke dalam sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif, dengan hak suara yang lebih luas bagi rakyat, kebebasan berpendapat, serta peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Demokrasi memiliki dampak besar terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia, baik dari segi kebijakan fiskal, moneter, pengelolaan sumber daya alam, hingga penguatan sektor swasta.

Berikut adalah beberapa pengaruh utama demokrasi terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia:

1. Peningkatan partisipasi publik dalam kebijakan ekonomi

Dalam sistem demokrasi, adanya kebebasan berpendapat dan media yang independen memungkinkan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam memengaruhi kebijakan ekonomi. Partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat secara terbuka mengajukan pandangan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, yang memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

¹³ Suryadinata, M. H. (2021). "Democracy and Economic Growth: The Indonesian Experience," *Journal of Southeast Asian Economics*, 35(2), 47-65.

Contohnya, kebijakan terkait alokasi anggaran publik, program pengentasan kemiskinan, dan distribusi bantuan sosial seringkali melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum-forum publik, dialog sosial, dan konsultasi antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat.

2. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi

Demokrasi mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan ekonomi. Dengan adanya kontrol dari legislatif, media, dan masyarakat, pemerintah lebih terdorong untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil. Hal ini dapat memperbaiki efisiensi alokasi anggaran dan meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing.

Misalnya, program-program seperti pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) lebih terbuka di era demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menyetujui kebijakan ekonomi yang diajukan oleh pemerintah, termasuk anggaran untuk sektor-sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, dan Kesehatan.

3. Fleksibilitas kebijakan ekonomi untuk mengakomodasi berbagai kepentingan

Demokrasi membuka ruang bagi keberagaman pandangan politik, yang memengaruhi pembuatan kebijakan ekonomi. Pemerintah yang dipilih secara demokratis harus mempertimbangkan berbagai kelompok kepentingan dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, meskipun terkadang juga dapat menyebabkan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada populisme jangka pendek.

Sebagai contoh, dalam beberapa periode pemilu, janji-janji populis terkait pengurangan pajak atau pemberian subsidi energi sering kali mempengaruhi kebijakan ekonomi, meskipun dampaknya terhadap anggaran negara bisa besar. Terkadang, ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak selalu mengutamakan keberlanjutan fiskal jangka panjang.

4. Penguatan sektor swasta dan pengelolaan sumber daya alam

Dalam sistem demokrasi, kebijakan ekonomi lebih menekankan pada penguatan sektor swasta, yang dianggap sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang lebih pro-pasar dan terbuka untuk investasi asing muncul sebagai hasil dari sistem demokrasi yang lebih transparan dan terarah. Reformasi kebijakan ekonomi di sektor pertanian, industri, dan perdagangan seringkali mengarah pada liberalisasi pasar dan privatisasi perusahaan milik negara.

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam juga dipengaruhi oleh dinamika politik demokrasi, dimana isu lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal lebih banyak mendapat perhatian. Kebijakan yang lebih mengakomodasi keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan sering kali menjadi hasil dari tekanan masyarakat sipil dalam sistem demokrasi yang terbuka.

5. Kebijakan fiskal dan penanggulangan kemiskinan

Sejak reformasi, pemerintah Indonesia lebih berfokus pada kebijakan fiskal yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan redistribusi yang lebih adil.

Meskipun kebijakan fiskal dalam demokrasi sering kali menghadapi tantangan terkait dengan politik populisme, yang dapat meningkatkan pengeluaran tanpa memperhatikan sustainability fiskal, kebijakan sosial berbasis kebutuhan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat luas dibandingkan dengan masa-masa rezim otoriter.

6. Tantangan dalam kebijakan ekonomi di era demokrasi

Meskipun demokrasi memberikan banyak keuntungan bagi kebijakan ekonomi, ada pula tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian politik yang dapat mengganggu implementasi kebijakan ekonomi. Perubahan pemerintahan yang terjadi setiap lima tahun sekali dapat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi, sehingga menciptakan ketidakpastian di kalangan investor dan pelaku bisnis.

Selain itu, seringnya terjadinya koalisi politik yang rumit di parlemen dapat memperlambat pembuatan kebijakan dan meningkatkan risiko terjadinya konflik kepentingan yang menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif.

Dinamika Politik dan Investasi Ekonomi di Indonesia.

Dinamika politik juga memengaruhi tingkat investasi, yang merupakan salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh *Ghosh & Gupta (2022)* menunjukkan bahwa di negara berkembang, seperti Indonesia, ketegangan politik dan ketidakpastian dapat mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Selama masa pemerintahan Joko Widodo, meskipun ada upaya yang signifikan untuk menarik investasi melalui program-program reformasi ekonomi, seperti paket kebijakan ekonomi, ketegangan politik dan polarisasi sosial yang terjadi dalam pemerintahan sering kali menurunkan efektivitas kebijakan tersebut. *Pratama (2021)* mencatat bahwa ketidakpastian yang terjadi menjelang Pemilu dan perubahan kebijakan yang dipengaruhi oleh dinamika politik domestik cenderung memengaruhi keputusan investasi jangka panjang di Indonesia.

Berdasarkan kajian pustaka yang ada, dapat disimpulkan bahwa meskipun peningkatan indeks demokrasi di Indonesia selama pemerintahan Joko Widodo menunjukkan perkembangan positif dalam hal kebebasan politik dan partisipasi publik, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidaklah selalu langsung atau linear. Dinamika politik yang terjadi, baik dalam bentuk ketegangan politik, perubahan kebijakan, maupun polarisasi sosial, memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi dan keputusan investasi.¹⁴ Oleh karena itu, meskipun demokrasi yang lebih baik dapat menciptakan ruang yang lebih besar untuk kebijakan ekonomi yang responsif dan inklusif, tantangan yang timbul dari dinamika politik tetap menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan di Indonesia.

¹⁴ Ghosh, A., & Gupta, P. (2022). "Democracy and Economic Development in Developing Countries," *World Development*, 133, 123-134.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Joko Widodo. Dengan memperhatikan data yang tersedia mengenai kualitas demokrasi, seperti kebebasan politik, hak asasi manusia, dan tingkat partisipasi politik, penelitian ini berusaha untuk melihat sejauh mana indikator demokrasi dapat mempengaruhi aspek-aspek ekonomi seperti tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), investasi, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Melalui analisis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dinamika politik, termasuk perubahan kebijakan, polarisasi sosial, dan stabilitas politik, mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Stabilitas politik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini akan melihat faktor-faktor politik dalam konteks pemerintahan Joko Widodo yang mungkin mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi, serta dampaknya terhadap keputusan ekonomi yang diambil oleh sektor publik dan swasta di Indonesia.

Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi interaksi antara indeks demokrasi dan dinamika politik dalam konteks pembangunan ekonomi. Dalam banyak kasus, meskipun negara memiliki sistem demokrasi yang baik, perubahan dalam dinamika politik dapat menimbulkan ketidakpastian yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba memahami apakah ada hubungan langsung atau tidak langsung antara kualitas demokrasi dan stabilitas politik dengan keberhasilan ekonomi Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan terkait untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan mengelola dinamika politik dengan lebih baik agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Penelitian ini juga berharap dapat memberikan wawasan bagi akademisi dan peneliti dalam memahami hubungan kompleks antara aspek politik dan ekonomi, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan tentang pengaruh demokrasi dan dinamika politik terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat berguna dalam merumuskan kebijakan publik di masa depan. Dengan mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor politik dan ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif, yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh indeks demokrasi dan dinamika

politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder yang diperoleh dari sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), *Economist Intelligence Unit* (EIU), dan World Bank. Variabel independen yang dianalisis adalah indeks demokrasi dan dinamika politik yang diukur melalui indikator kebebasan sipil, partisipasi politik, serta stabilitas politik, sementara variabel dependen adalah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik, seperti SPSS atau STATA, untuk menguji hubungan dan signifikansi antara variabel-variabel tersebut.

PEMBAHASAN

Pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dalam aspek demokrasi dan dinamika politik yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang mencerminkan kualitas demokrasi berdasarkan kebebasan politik, hak sipil, dan kualitas institusi politik, menunjukkan tren positif. Kebebasan politik yang meningkat serta pemilu yang lebih transparan dan inklusif memberi dampak positif pada stabilitas politik. Stabilitas ini menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Demokrasi yang lebih matang selama pemerintahan Jokowi juga berperan dalam memperbaiki kebijakan ekonomi yang lebih transparan dan responsif. Masyarakat semakin aktif dalam berpartisipasi dalam politik, baik melalui pemilu maupun gerakan sosial. Keputusan pemerintah yang lebih terbuka terhadap aspirasi rakyat membantu menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, seperti program pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meratakan distribusi ekonomi di seluruh Indonesia.¹⁵ Kebijakan ini mendukung konektivitas antar daerah, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan membuka peluang lapangan kerja, yang berkontribusi pada laju pertumbuhan ekonomi yang positif.

Namun, dinamika politik yang terjadi selama pemerintahan Jokowi juga membawa tantangan tersendiri. Polarisasi politik yang tajam, terutama pasca Pemilu Presiden, kadang menghambat proses legislatif dan pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Koalisi politik yang besar memerlukan konsensus dari berbagai pihak, yang terkadang memperlambat implementasi kebijakan ekonomi yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan. Selain itu, meskipun Indonesia mengalami peningkatan dalam kualitas demokrasi, tantangan seperti korupsi dan birokrasi yang lambat tetap menghambat efisiensi kebijakan ekonomi.

Sementara itu, kebijakan Jokowi untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui reformasi, seperti Omnibus Law, bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menarik investasi. Walaupun kebijakan ini menghadapi kritik dari beberapa kelompok, terutama terkait dampaknya terhadap pekerja dan lingkungan, namun kebijakan ini tetap berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih

¹⁵ Schumpeter, J. A. (2003). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Harper & Row.

ramah bagi dunia usaha. Investasi asing dan domestik yang meningkat di sektor infrastruktur dan manufaktur membantu menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan politik dan sosial dalam proses pembangunan, peningkatan kualitas demokrasi dan kebijakan ekonomi yang inklusif selama pemerintahan Jokowi telah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dinamika politik yang terkendali, bersama dengan reformasi kebijakan yang mendukung iklim investasi, berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang matang dapat menjadi landasan penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁶

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi di Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti kebebasan politik, hak-hak sipil, dan kualitas institusi politik. Pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), indeks demokrasi Indonesia menunjukkan dinamika yang penting, baik dalam hal kemajuan maupun tantangan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa poin utama terkait Indeks Demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi:

1. Peningkatan kualitas demokrasi

- **Kebebasan Politik:** Pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami peningkatan dalam hal kebebasan politik. Salah satu pencapaian penting adalah pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang lebih terbuka dan bebas dari kecurangan yang signifikan. Keberagaman pilihan politik masyarakat dapat tercermin dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung dan bebas.

- **Pemilu yang Lebih Transparan dan Demokratis:** Pemerintahan Jokowi memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Proses penghitungan suara yang semakin akurat dan cepat melalui teknologi juga memberi kepercayaan lebih besar kepada masyarakat terhadap hasil pemilu.

Dampak pada Indeks Demokrasi:

- Peningkatan kebebasan politik di Indonesia selama era Jokowi berkontribusi pada kenaikan skor IDI, karena adanya proses pemilihan yang lebih terbuka dan kredibel. Hal ini menciptakan ruang bagi partisipasi politik yang lebih besar, baik melalui pemilu maupun bentuk-bentuk partisipasi lainnya seperti demonstrasi dan pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.

2. Hak-Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat

- **Kebebasan Pers:** Kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi mengalami perkembangan meskipun ada beberapa tantangan. Media massa dan jurnalis diberi kebebasan untuk melaporkan kebijakan pemerintah serta berbagai

¹⁶ The Economist Intelligence Unit (2023). "Democracy Index 2023: The State of Democracy."

isu penting lainnya, meskipun terkadang terdapat upaya pembatasan terhadap kebebasan pers di beberapa daerah. Beberapa insiden kekerasan terhadap jurnalis dan upaya sensor terhadap media tertentu sempat mencuat, tetapi secara keseluruhan, kebebasan pers di Indonesia tetap terjaga.

- Partisipasi Sosial dan Organisasi Masyarakat: Indonesia juga menunjukkan peningkatan dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul. Masyarakat semakin aktif dalam berpartisipasi dalam berbagai gerakan sosial, baik itu terkait dengan hak asasi manusia, lingkungan, maupun isu-isu sosial lainnya.

Dampak pada Indeks Demokrasi:

- Peningkatan kebebasan berbicara dan hak sipil menciptakan iklim yang lebih demokratis di Indonesia, meskipun masih terdapat hambatan terkait dengan kebebasan berpendapat di beberapa area. Hal ini turut mempengaruhi penilaian IDI yang mencatat adanya peningkatan kualitas demokrasi.

3. Kualitas Institusi Politik

- Pemanjapan Demokrasi dan Sistem Politik: Pemerintahan Jokowi berupaya untuk memperkuat institusi-institusi demokrasi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga-lembaga pengawas lainnya. Peningkatan kualitas institusi-institusi ini penting untuk memperkuat sistem politik yang transparan dan akuntabel.

- Reformasi Hukum dan Penguatan KPK: Selama pemerintahan Jokowi, meskipun menghadapi tantangan politik, KPK berhasil meningkatkan upaya pemberantasan korupsi yang berkontribusi pada perbaikan tata kelola pemerintahan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada dinamika politik yang memperlemah lembaga ini, yang memunculkan kekhawatiran terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Dampak pada Indeks Demokrasi:

- Walaupun ada upaya untuk memperkuat sistem politik dan demokrasi, tantangan dalam penguatan institusi politik dan hukum tetap ada, terutama terkait dengan integritas lembaga-lembaga penting. Meskipun demikian, kualitas institusi politik yang terus diperbaiki berkontribusi pada penguatan demokrasi Indonesia.

4. Polarisasi Politik dan Stabilitas Demokrasi

- Dinamika Politik dan Polarisasi: Selama masa pemerintahan Jokowi, Indonesia menghadapi polarisasi politik yang cukup tajam, terutama selama pemilihan presiden. Pemilu 2014 dan 2019 menandai perpecahan politik yang signifikan antara pendukung Jokowi dan pesaingnya. Meskipun demikian, polarisasi ini tidak merusak stabilitas politik secara keseluruhan, meskipun menciptakan ketegangan sosial dalam beberapa kesempatan.

- Koalisi Pemerintah dan Pengaruhnya: Jokowi memilih untuk bekerja dengan koalisi yang luas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun hal ini meningkatkan stabilitas politik, namun dinamika koalisi yang besar terkadang

memperlambat proses pembuatan kebijakan dan bisa menciptakan ketegangan dalam politik.

Dampak pada Indeks Demokrasi:

- Polarisasi politik yang terjadi memperburuk hubungan sosial antar kelompok di masyarakat, yang terkadang menciptakan ketegangan sosial. Meskipun demikian, pengelolaan polarisasi ini dengan menjaga demokrasi tetap berjalan secara aman dan tertib, membuat IDI Indonesia tetap relatif stabil meskipun ada beberapa tantangan.

5. Pengaruh reformasi kebijakan

- Reformasi Sektor Ekonomi dan Sosial: Pemerintahan Jokowi juga melaksanakan berbagai reformasi dalam sektor ekonomi dan sosial, seperti melalui pengesahan Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan peraturan dan meningkatkan daya saing Indonesia. Meski menuai kritik dari beberapa kalangan, kebijakan ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan iklim investasi dan ekonomi Indonesia.

- Kebijakan Pembangunan Infrastruktur: Salah satu kebijakan unggulan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif, yang juga bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Kebijakan ini mendapat dukungan luas di kalangan masyarakat, meskipun juga menghadapi tantangan politik terkait dengan pembiayaan dan prioritas pembangunan.

Dampak pada Indeks Demokrasi:

- Reformasi kebijakan dalam bidang ekonomi dan sosial, meskipun dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tidak selalu dapat diterima secara luas, terutama jika berkaitan dengan kebebasan berpendapat atau keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Hal ini mempengaruhi dinamika politik dan, pada akhirnya, indeks demokrasi Indonesia.

6. Penurunan dan Peningkatan Indeks Demokrasi

- Tantangan yang Dihadapi: Meskipun secara umum Indonesia mengalami peningkatan dalam indeks demokrasi, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti pemberantasan korupsi yang belum optimal, kesenjangan sosial yang masih tinggi, serta masih adanya pengekangan terhadap kebebasan berpendapat di beberapa sektor.

- Peningkatan Transparansi dan Partisipasi: Meskipun ada tantangan, Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi telah membuat kemajuan dalam hal transparansi pemerintahan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik, yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi dalam jangka panjang.

Indeks Demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun tetap ada tantangan besar. Dalam banyak hal, Jokowi berhasil menjaga stabilitas politik dan mengembangkan kebebasan politik serta hak-hak sipil. Meskipun demikian, beberapa dinamika politik, polarisasi sosial,

dan isu korupsi masih menjadi hambatan bagi penguatan demokrasi yang lebih sempurna di Indonesia.¹⁷

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pengaruh Indeks Demokrasi dan dinamika politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama masa pemerintahan Joko Widodo menunjukkan hubungan yang saling terkait. Peningkatan kualitas demokrasi, termasuk kebebasan politik yang lebih besar dan transparansi dalam pengambilan keputusan, telah menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Meskipun terdapat tantangan seperti polarisasi politik dan birokrasi yang lambat, kebijakan pemerintah yang inklusif, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan reformasi ekonomi, berkontribusi pada peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. Dinamika politik yang stabil dan kebijakan pro-investasi memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, R.A., Putri, G.C., & Ardhani, I.(2018). Haluan Baru Politik Luar
Buszynski, L. (1992). Southeast Asia in the Post-Cold War Era: Regionalism and Security. *Asian Survey*, 32(9), 830-847. <https://doi.org/10.2307/2645074>
- Indonesia Democracy Index (IDI)**. (2023). *Laporan Tahunan Indeks Demokrasi Indonesia*. Badan Pusat Statistik (BPS).
- Mietzner, M.** (2017). *The Political Economy of Indonesia's Transition to Democracy: The Struggle for Political Reform*. Cornell University Press. Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2), 77-91. <https://doi.org/10.18196/hi.62112>
- Prasetyo, H.** (2019). "Political Stability and Economic Growth in Indonesia: The Role of Democracy." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 115-132.
- Schumpeter, J. A.** (2003). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Harper & Row.
- Sjahrir, R.** (2015). *Reformasi Ekonomi Indonesia: Antara Kemajuan dan Tantangan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- The Economist Intelligence Unit.** (2023). "Democracy Index 2023: The State of Democracy." *The Economist*.
- World Bank.** (2022). *Indonesia Economic Prospects: Rising to the Challenge*. World Bank Group.

¹⁷ Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). (2021). *Annual Investment Report*.